

Dimana dalam melakukan sebuah pengurangan risiko bencana , membentuk sebuah komunitas siaga bencana adalah sebuah keharusan. Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwasanya desa sumurup termasuk ke dalam daerah yang rawan bencana terutama bencana tanah longsor. Dengan adanya isu yang sangat kuat di desa, maka fasilitator dan juga masyarakat bersepaakat untuk membangun sebuah komunitas yang nantinya akan bisa membantu mengurangi risiko dan bahaya masyarakat terhadap bencana, baik itu pra bencana maupun pasca bencana.

Partisipasi ini telah menafikan generalisasi bahwa masyarakat dalam konteks bencana selalu bersifat pasif karena statusnya sebagai korban, menjadi sesuatu yang aktif, mereka terlibat dalam proses dan aktivitas penanggulangan bencana. Kegiatan peningkatan kesiapsiagaan bencana tidak lagi hanya dengan konsep penyuluhan dan sosialisasi semata namun mulai mengajak masyarakat untuk terlibat menjadi bagian dari proses penanggulangan bencana itu sendiri.

Kelompok Tagana ini awalnya dibentuk di tingkat kabupaten, namun mulai berkembang di tingkat kelurahan. Rupanya, membangun masyarakat yang aktif dan peduli bukanlah perkara mudah, hal ini terlihat dari kegiatan yang pernah dilakukan di desa itu sendiri.

Permasalahan krusial yang dihadapi Tagana Saat ini adalah minimnya pemahaman dan pelatihan yang dimiliki oleh anggota Tagana terkait pengetahuan penanganan bencana. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah desa dalam hal ini BPBD dan TAGANA tingkat kabupaten trenggalek. Akan sayang sekali jika semangat dan kepedulian yang cukup besar

Dalam hal ini,tingkat ketinggian dan tajamnya lereng-lereng akan terlihat lebih jelas. Dengan adanya peta kontur ini juga akan lebih memudahkan pembaca untuk bias memahami apakah tempat tinggalnya termasuk daerah rawan bencana. Lereng yang menumpuk atau terlihat lebih dekat biasanya yang sering terjadi bencana alam tanah longsor.

C. Melakukan pendidikan kebencanaan

Sector pendidikan merupakan salah satu media yang tepat untuk menginformasikan dan mentransformasikan bagaimana cara menghadapi bencana dan mengurangi risiko serta dampak dari bencana. Munculnya gagasan pendidikan kebencanaan merupakan tindak lanjut dari program pemerintah di sector pendidikan. Tujuannya adalah mewujudkan cita-cita pembangunan dan pengembangan komunitas taruna siaga banecana guna untuk membangun desa yang tangguh terhadap bencana. Produk pendidikan ini diharapkan melahirkan kesadaran dan perilaku yang di tunjang oleh proses pelembagaan dalam system yang lebih luas dalam membangun budaya keselamatan (*safety*) dan ketangguhan (*resilience*).

Pendidikan juga merupakan instrument terbaik dalam upaya pengurangan risiko bencana. Tanggungjawab pendidikan di antara mencakup, tahap kesiapsiagaan bencana (*disaster preparedness education*). Suatu aktivitas yang adapat dilakukan mulai dari yang sederhana hingga yang terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen bencana (*disaster management*).

Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi untuk menggapai berjalannya suatu program. Sedangkan, Pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak bagi warga Negara Indonesia. Pendidikan adalah jalan terbaik untuk meningkatkan taraf kehidupan sebuah generasi tak terkecuali di Indonesia. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang disediakan oleh Pemerintah masih tergolong minim untuk wilayah-wilayah tertentu menjadikan kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk ditengah-tengah perkembangan Globalisasi yang sangat pesat saat ini. Ketiadaan dukungan sarana belajar sering menjadi kambing hitam tidak maksimalnya kualitas pendidikan. Faktanya memang demikianlah yang terjadi di berbagai sekolah-sekolah di pelosok negeri ini. Kurangnya kapasitas ruang belajar dan jumlah guru membuat pembagian kelas menjadi sangat biasa terjadi di sekolah-sekolah pelosok. Bukan hanya kekurangan ruang belajar, sekolah-sekolah di pelosok negeri ini kekurangan tenaga pengajar. Tenaga pengajar atau guru ini biasanya bukan dari penduduk asli sekitar sekolah melainkan dari berbagai daerah di Indonesia. Tak layak nya gaji dan tunjangan bahkan sulitnya menjangkau sekolah-sekolah menjadikan guru-guru disana enggan mengajar karena sulitnya jalan yang akan mereka lewati.

Kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara berkembang lainnya. Banyaknya tawuran antar pelajar semakin menambah

terpuruknya dan gagalnya pendidikan di Indonesia. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan guru menjadikan hal-hal negatif muncul di tengah-tengah pelajar.

Bukan tanpa upaya, pemerintah bahkan sudah berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara memberi tunjangan kepada tenaga pendidik dan seleksi tenaga pengajar yang berkualitas, tak mudah pemerintah mengeluarkan tunjangan untuk pendidik. Namun hal ini malah menambah beban negara dengan pengeluaran begitu banyaknya tanpa ada hasil. Tunjangan ini malah disalah gunakan untuk kesejahteraan dirinya dan keluarganya bukan malah menambah kualitas pendidikan. Pendidikan seringkali dijadikan sebagai bisnis tanpa memikirkan kualitas pendidikannya. Berbagai macam masalah sedang mendera negeri ini, utamanya pendidikan. Bila tak cepat dibenahi sistem dan kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin terpuruk untuk generasi selanjutnya.

Salah satu pendidikan yang dilakukan oleh peneliti di desa sumurup adalah dengan melakukan sebuah pelatihan dan pembinaan penanggulangan risiko bencana. Kegiatan tersebut di isi oleh pihak BPBD, Muspika kecamatan bendungan serta seluruh anggota TAGANA desa sumurup. Dengan berjalannya kegiatan tersebut, dilakukanlah pengukuhan anggota TAGANA desa sumurup supaya lebih berjalan dengan lancar.

Kegiatan advokasi haruslah merupakan sebuah proses kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis, dirancang untuk mendesak terjadinya perubahan baik dalam isu, tata-laksana maupun budaya hukum yang berlaku. Menghadapi bencana alam tersebut Pemerintah dianggap kurang optimal. Pemerintah cenderung kurang persiapan karena kurangnya pengawasan terhadap kebijakan yang diambil.

Prosedur yang berbelit-belit dan pemotongan dana rekonstruksi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab menjadi salah satu penyebab munculnya konflik baru. Dalam hal ini pemerintah dianggap kurang *responsive* menghadapi aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat semakin terdesak akan kebutuhan tempat tinggal pemerintah cenderung birokratis dalam menyalurkan dana rekonstruksi. Tujuan pemerintah yang berhati-hati dalam memberikan dana tersebut memang bisa dimaklumi, untuk menghindari salah sasaran. Namun, seharusnya pemerintah lebih fleksibel.

Pada tanggal 28 Desember 2016 perangkat desa serta ketua Rt melakukan rapat untuk membangun desa kedepannya, salah satunya untuk melakukan rabat jalan. Disela istirahat peneliti bertanya kepada perangkat desa yakni kepada sekretaris desa tentang anggaran dan desa yang di khususkan untuk menangani kebencanaan di desa, dan jawabannya adalah belum berani, dikarenakan belum ada dasar hukum yang kuat. Kemudian peneliti tetap mendiskusikan dana tersebut dan jawabannya tetep belum berani.

Belum berhenti begitu saja, peneliti selalu mendiskusikan tentang anggaran dana desa kepada kepala desa, kemudian tiba-tiba kepala desa

memberikan jawaban bahwa dia akan mengusahakan hal tersebut. Hal ini bisa dilihat karena problem yang sangat kuat atau isu yang sangat hits di desa adalah tentang kebencanaan.

Kemudian di pertemuan musyawarah berikutnya ternyata anggaran dana desa yang jatuh secara khusus untuk mendanai sebuah kebencanaan telah diberikan, kira-kira sebesar Rp. 8.000.000,00-. Bukan jumlah yang sedikit karena untuk menyisihkan uang yang secara khusus mendanai kebencanaan adalah hal yang sangat besar dan juga sulit. Dengan adanya isu yang sangat sering terjadi, maka itu akan menjadi salah satu alasan yang sangat kuat. Banyak orang beranggapan bahwa advokasi adalah tindakan Pembelaan Hukum (Litigasi) di pengadilan. Pandangan semacam ini tidak selamanya salah. Namun, juga tidak sepenuhnya benar. Menurut Mansour Faqih, advokasi bisa dikatakan sebagai usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan menggerakkan perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju.

Untuk membuat surat keputusan yang berfokus pada kebencanaan harus didasari UU. Adapun UU yang harus dimasukkan adalah UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian memakai Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Serta Peraturan Kepala BNPB No 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Pada dasarnya tujuan advokasi adalah melakukan pembelaan serta pendampingan terhadap seseorang atau masyarakat untuk menjamin dan memperjuangkan hak-haknya secara demokratis

atau bisa juga dengan membuat bangunan penahan, jangkar dan pilling. Tidak hanya itu, terasering dengan system drainase yang tepat kemudian penghijauan dengan tanaman yang system perakarannya dalam jarak tanam yang tepat. Kemudian untuk masalah yang berkaitan dengan keadaan lingkungan, tentu hal ini juga membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang dapat dimulai dari lingkungan disekitar tempat tinggalnya.

F. Simulasi Bencana Alam Tanah Longsor

Memasuki musim hujan tahun 2016 di desa sumurup sudah mulai terjadi bencana alam tanah longsor dalam skala kecil. Hal ini sudah terjadi di beberapa Rt dalam desa tersebut. Karena curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan pergeseran tanah dan sebagian ada juga tanah yang longsor.

Di desa sumurup sering sekali terjadi bencana alam tanah longsor bahkan tanah gerak di pemukiman warga ataupun di tanah perhutani. Hal ini bila tidak diantisipasi akan mengancam keselamatan warga dan pemukiman bila terjadi hujan deras dengan intensitas tinggi dan lama yang menyebabkan tanah longsor dan diperkirakan bisa menimbun penduduk yang berada di bawah lereng tersebut.

Melihat kejadian tersebut, fasilitator beserta anggota TAGANA bekerjasama mengadakan pemetaan beserta pembinaan pengurangan risiko bencana dan mengantisipasi bila terjadi bencana alam tanah longsor sekecil mungkin tidak ada korban, Yaitu dengan mengadakan simulasi penanggulangan bencana alam tanah longsor.

Bila pada suatu siang atau malam hari terdengar bunyi kentongan, orang akan memberikan perhatian padanya sambil dengan seksama menghitung tabuhan (pukulan) yang akan menyusul. Dari frekuensi pukulan dengan irama yang berbeda untuk setiap peristiwa, diketahuilah apa yang sedang terjadi dan strategi apakah yang harus disiagakan untuk menghadapinya. Pada malam hari di pedukuhan-pedukuhan terpencil para petugas ronda sering menyatakan kehadirannya melalui bunyi tetekan. Peronda sering membawa kentongan yang terbuat dari bambu.

Gambar diatas menjelaskan begitu kentalnya kearifan local yang ada dan masih mereka gunakan hingga saat ini, yakni menggunakan kentongan sebagai symbol guna untuk memberitakan masyarakat bahwasanya telah terjadi bencana alam tanah longsor. Pukulan dilakukan selama 3 kali ketukan secara terus menerus sampai semua masyarakat benar-benar lari kearah jalur evakuasi.

Memukul kentongan juga merupakan peringatan dini yakni serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

2. Mengevakuasi kelompok rentan 1 (lansia)

Lansia merupakan salah satu kelompok rentan yang masih seringkali terabaikan. Sebenarnya, kelompok rentan itu membutuhkan perhatian khusus dalam pemberian makan pada situasi darurat yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing dan berbeda dengan golongan umum lainnya.

